

STRATEGI KOMUNIKASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN OKU TIMUR DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN RESES

Selvi Ramadani Dwi H¹, Rahma Dwi Andini², Dina Julia³, Natasya Deswita
Andhini⁴, Kelin Ersalia⁵, Adelia Cantina⁶, Rakhmat Saleh⁷
¹⁻⁷ Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Baturaja
¹selviramadanidwihendri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyse the communication strategies employed by members of the East OKU Regency Regional People's Representative Council (DPRD) in gathering public aspirations through recess activities. Communication plays a vital role in the functioning of the DPRD; through effective communication, DPRD members can obtain information regarding the needs and issues raised by the public, which can then be utilised in the performance of the DPRD's duties and functions. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study are members of the East OKU Regency DPRD who are involved in recess activities. Data collection techniques included interviews, observation and documentation. The analysis focuses on communication strategies, encompassing the communicator, the message, the communication medium or channel, the recipient, and feedback within the process of gathering public aspirations. It is hoped that the research findings will provide an overview of the communication strategies employed by members of the East OKU Regency DPRD in establishing communication with the public during recess activities, as well as the process of conveying public aspirations to inform the DPRD's duties.

Keywords: *communication strategies, government communication, DPRD, public aspirations, recess.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU Timur dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Komunikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD karena melalui komunikasi yang efektif, anggota DPRD dapat memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang disampaikan masyarakat untuk kemudian menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten OKU Timur yang terlibat dalam kegiatan reses. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian difokuskan pada strategi komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media atau saluran komunikasi, komunikan, serta umpan balik dalam proses penyerapan aspirasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam membangun komunikasi dengan masyarakat selama kegiatan reses serta proses penyampaian aspirasi sebagai bahan pelaksanaan tugas DPRD.

Kata kunci: strategi komunikasi, komunikasi pemerintahan, DPRD, aspirasi masyarakat, reses.

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, membangun koordinasi, menyampaikan kebijakan, serta memperoleh masukan dari masyarakat. Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi tidak hanya berlangsung antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan. Melalui komunikasi yang baik, pemerintah dan lembaga perwakilan dapat memahami kebutuhan, permasalahan, serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota DPRD membutuhkan informasi dan masukan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu,

komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi.

Salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat adalah melalui kegiatan reses. Kegiatan reses memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya, bertemu dengan masyarakat, serta mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, dan kebutuhan yang disampaikan secara langsung. Aspirasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi melalui reses tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD dalam menerima informasi, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut dibangun dan diarahkan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Anggota DPRD perlu menentukan cara menyampaikan informasi, memilih

media atau saluran komunikasi yang sesuai, membangun interaksi dengan masyarakat, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi bagian yang penting dalam mendukung proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi representasi, anggota DPRD Kabupaten OKU Timur melaksanakan kegiatan reses sebagai salah satu bentuk interaksi langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada anggota DPRD untuk kemudian menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Namun, proses penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses dapat menghadapi berbagai kondisi, seperti keterbatasan waktu, keberagaman kebutuhan masyarakat, perbedaan pemahaman antara anggota DPRD dan masyarakat, maupun

keterbatasan dalam penyampaian dan tindak lanjut aspirasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyerapan aspirasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan reses, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan anggota DPRD dalam membangun interaksi dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai strategi komunikasi anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana anggota DPRD Kabupaten OKU Timur membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan reses, bagaimana pesan dan aspirasi disampaikan, saluran komunikasi yang digunakan, serta bagaimana anggota DPRD menerima dan merespons aspirasi yang disampaikan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Strategi Komunikasi Anggota

DPRD Kabupaten OKU Timur dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Kegiatan Reses.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai strategi komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Penelitian tidak berfokus pada pengukuran secara statistik, tetapi menggambarkan proses komunikasi berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh dari informan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di DPRD Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji strategi komunikasi anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses sebagai salah satu sarana penyerapan aspirasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan

keterlibatan langsung dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini



adalah anggota DPRD Kabupaten OKU Timur yang pernah mengikuti atau melaksanakan kegiatan reses. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian sampai informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab fokus penelitian.

Penelitian berfokus pada strategi komunikasi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Fokus tersebut dianalisis melalui beberapa unsur strategi komunikasi, yaitu:

- Komunikator, yaitu anggota DPRD sebagai pihak yang melakukan komunikasi dengan masyarakat.
- Pesan, yaitu informasi yang disampaikan dalam kegiatan reses serta aspirasi yang diterima dari masyarakat.

- Media atau saluran komunikasi, yaitu sarana yang digunakan dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi.
- Komunikan, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi dalam kegiatan reses.
- Umpan balik, yaitu tanggapan dan respons yang muncul selama proses komunikasi serta bagaimana aspirasi tersebut diterima oleh anggota DPRD.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada anggota DPRD Kabupaten OKU Timur untuk memperoleh informasi mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam kegiatan reses. Observasi dilakukan untuk melihat proses komunikasi dan interaksi yang berkaitan dengan kegiatan reses, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, foto, maupun informasi terkait pelaksanaan reses.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai strategi komunikasi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa anggota DPRD, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten OKU Timur, kegiatan reses dilaksanakan sebagai salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk bertemu dan berkomunikasi secara

langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, keluhan, maupun permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.



Anggota DPRD menyampaikan bahwa kegiatan reses tidak hanya diisi dengan penyampaian informasi dari anggota DPRD kepada masyarakat, tetapi juga dilakukan melalui dialog dan diskusi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, kemudian anggota DPRD memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang disampaikan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa komunikasi secara langsung dalam kegiatan reses membantu anggota DPRD memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi yang muncul dalam kegiatan tersebut kemudian dicatat untuk

menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan anggota DPRD dalam menyerap aspirasi lebih banyak menggunakan pendekatan komunikasi secara langsung. Anggota DPRD berusaha menciptakan suasana komunikasi yang terbuka sehingga masyarakat merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, anggota DPRD menggunakan bahasa yang sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara lebih terbuka.

Selain itu, anggota DPRD juga melakukan komunikasi dua arah melalui sesi tanya jawab dan diskusi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat memberikan tanggapan maupun menjelaskan permasalahan yang mereka alami secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, aspirasi yang disampaikan

masyarakat dalam kegiatan reses memiliki bentuk yang beragam. Aspirasi tersebut antara lain berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan masyarakat lainnya.

Aspirasi mengenai infrastruktur menjadi salah satu hal yang cukup sering disampaikan karena masyarakat secara langsung merasakan kondisi fasilitas di lingkungan mereka. Selain itu, terdapat pula aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan fasilitas yang menunjang aktivitas masyarakat.

Anggota DPRD menjelaskan bahwa beragamnya aspirasi tersebut membuat setiap aspirasi perlu dicatat dan dikelompokkan agar dapat diketahui permasalahan serta kebutuhan yang menjadi perhatian masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aspirasi yang diperoleh melalui kegiatan reses tidak secara langsung seluruhnya dapat direalisasikan. Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat terlebih dahulu dicatat dan kemudian disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD.

Anggota DPRD menjelaskan bahwa tindak lanjut terhadap aspirasi juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan, serta ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, anggota DPRD perlu melihat kembali jenis aspirasi yang disampaikan untuk menentukan proses penyampaian dan tindak lanjutnya.

Dengan demikian, kegiatan reses menjadi tahap awal dalam proses penyerapan aspirasi. Setelah aspirasi diterima, masih terdapat proses berikutnya agar aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil diskusi, anggota DPRD berupaya memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses. Tanggapan tersebut dapat berupa penjelasan mengenai permasalahan yang disampaikan, kewenangan DPRD, maupun mekanisme yang harus dilalui dalam menindaklanjuti aspirasi.

Anggota DPRD juga menjelaskan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung diwujudkan karena terdapat proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu,

masyarakat diberikan pemahaman bahwa penyampaian aspirasi melalui reses merupakan bagian dari proses yang selanjutnya perlu diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses penyerapan aspirasi. Salah satu hambatan adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sementara aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam.

Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan DPRD. Beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar kewenangan langsung DPRD sehingga membutuhkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait.

Hambatan lainnya adalah banyaknya aspirasi yang harus dicatat dan dikelompokkan. Kondisi tersebut membuat anggota DPRD perlu melakukan penyaringan dan pengelompokan aspirasi berdasarkan jenis permasalahan, kebutuhan masyarakat, serta kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten OKU Timur menggunakan kegiatan reses sebagai salah satu sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara dua arah melalui penyampaian informasi, dialog, diskusi, dan penerimaan aspirasi.

Aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam kegiatan reses umumnya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dicatat dan disampaikan melalui mekanisme DPRD dengan mempertimbangkan kewenangan, perencanaan, dan kemampuan anggaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan waktu, banyaknya aspirasi, dan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan menjadi beberapa hambatan dalam proses penyerapan aspirasi. Oleh karena itu, kegiatan reses tidak hanya menjadi tempat untuk menerima aspirasi, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat

mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, anggota DPRD Kabupaten OKU Timur memiliki posisi sebagai komunikator dalam kegiatan reses. Namun, peran tersebut tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Anggota DPRD juga berperan sebagai penerima informasi karena masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan secara langsung.

Jika dikaitkan dengan unsur komunikasi “Who” dalam model komunikasi Harold D. Lasswell, anggota DPRD menjadi pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Kemampuan komunikator dalam menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara dapat memengaruhi keterbukaan dalam proses penyampaian aspirasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan anggota DPRD cenderung bersifat terbuka dan dua arah. Anggota DPRD tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mendengarkan dan

memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD menjalankan fungsi komunikasi sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan daerah.

Dalam model Lasswell, unsur “What” berkaitan dengan pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Dalam kegiatan reses, pesan yang muncul berasal dari dua arah. Anggota DPRD menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi DPRD, sedangkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, aspirasi masyarakat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Beragamnya pesan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan reses menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi masyarakat di daerah pilihannya.

Pesan dalam komunikasi pemerintahan tidak hanya perlu disampaikan, tetapi juga harus

dipahami oleh pihak yang menerima. Penggunaan bahasa yang sederhana dalam kegiatan reses menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesalahpahaman antara anggota DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pesan turut menentukan keberhasilan komunikasi dalam proses penyerapan aspirasi.

Unsur "In Which Channel" dalam model Lasswell berkaitan dengan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka menjadi saluran utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten OKU Timur.

Komunikasi tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung melalui dialog, tanya jawab, dan diskusi. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjelaskan permasalahan secara lebih rinci dan kepada anggota DPRD untuk memberikan respons secara langsung.

Penggunaan komunikasi langsung juga memungkinkan anggota DPRD memperoleh umpan balik secara segera. Hal ini menjadi penting dalam komunikasi

pemerintahan karena informasi yang diperoleh secara langsung dapat membantu anggota DPRD memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan lebih jelas.

Unsur "To Whom" menunjukkan pihak yang menjadi penerima pesan dalam proses komunikasi. Dalam kegiatan reses, masyarakat tidak hanya menjadi komunikan yang menerima informasi dari anggota DPRD, tetapi juga menjadi sumber informasi melalui aspirasi yang disampaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh sebab itu, anggota DPRD perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi dan karakteristik masyarakat yang ditemui.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, masyarakat sebagai komunikan memiliki posisi yang penting karena keberadaan masyarakat menjadi sumber informasi bagi lembaga perwakilan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi masukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.

Unsur “With What Effect” berkaitan dengan dampak atau hasil yang muncul setelah proses komunikasi berlangsung. Dalam kegiatan reses, efek komunikasi tidak hanya dapat dilihat dari diterimanya aspirasi masyarakat, tetapi juga dari adanya respons dan proses tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, anggota DPRD memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, anggota DPRD tidak dapat secara langsung merealisasikan seluruh aspirasi karena terdapat mekanisme perencanaan, penganggaran, serta batas kewenangan dalam pemerintahan daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penyerapan aspirasi dan realisasi aspirasi. Penyerapan merupakan proses menerima dan mencatat kebutuhan masyarakat, sedangkan realisasi membutuhkan proses lebih lanjut melalui mekanisme pemerintahan. Oleh karena itu, pemberian informasi mengenai proses dan batas kewenangan menjadi bagian penting dari komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat.

Jika dilihat secara keseluruhan, strategi komunikasi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur melalui kegiatan reses menunjukkan adanya proses komunikasi dua arah. Anggota DPRD bertindak sebagai penyampai informasi sekaligus penerima aspirasi, sedangkan masyarakat memiliki ruang untuk memberikan informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Strategi tersebut sejalan dengan karakter komunikasi pemerintahan yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah atau lembaga perwakilan dengan masyarakat. Komunikasi langsung melalui reses memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam menyampaikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi komunikasi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan waktu, banyaknya aspirasi, dan perbedaan pemahaman mengenai kewenangan DPRD. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif perlu didukung dengan pengelolaan aspirasi yang lebih terstruktur

sehingga informasi yang diperoleh melalui reses dapat dikelompokkan dan disampaikan sesuai dengan bidang serta kewenangannya.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, strategi komunikasi memiliki peran dalam menentukan bagaimana aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan diterima oleh anggota DPRD. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan dua arah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan secara langsung.

Kegiatan reses dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan formal DPRD, tetapi juga menjadi media komunikasi pemerintahan yang mempertemukan lembaga perwakilan dengan masyarakat. Melalui proses tersebut, anggota DPRD memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menjalankan fungsi representasi.

Dengan demikian, strategi komunikasi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dapat dilihat dari kemampuan anggota DPRD sebagai komunikator, kejelasan

pesan, penggunaan komunikasi tatap muka sebagai saluran utama, keterlibatan masyarakat sebagai komunikan sekaligus sumber informasi, serta pemberian umpan balik terhadap aspirasi yang disampaikan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk proses komunikasi yang mendukung penyerapan aspirasi masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, dapat disimpulkan bahwa kegiatan reses menjadi salah satu sarana komunikasi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, anggota DPRD menggunakan komunikasi secara terbuka dan dua arah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi di lingkungan mereka.

Strategi komunikasi yang dilakukan dapat dilihat melalui unsur komunikator, pesan, saluran

komunikasi, komunikan, dan umpan balik. Anggota DPRD berperan sebagai komunikator sekaligus menerima informasi dari masyarakat, sedangkan kegiatan reses menjadi saluran utama dalam menyampaikan dan menerima pesan secara langsung. Aspirasi yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikasi secara langsung membantu menciptakan interaksi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Aspirasi yang diperoleh melalui kegiatan reses selanjutnya dicatat dan disampaikan melalui mekanisme DPRD untuk menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Namun, penyerapan aspirasi tidak secara langsung berarti seluruh aspirasi dapat direalisasikan karena masih dipengaruhi oleh kewenangan, perencanaan, prioritas, dan ketersediaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu, banyaknya aspirasi yang disampaikan, beragamnya kebutuhan

masyarakat, serta perbedaan pemahaman mengenai kewenangan DPRD.

Dengan demikian, strategi komunikasi yang terbuka, sederhana, dan dua arah dalam kegiatan reses memiliki peran penting dalam membantu anggota DPRD memahami kebutuhan masyarakat. Kegiatan reses juga menjadi bagian dari komunikasi pemerintahan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kepada lembaga perwakilan.

- **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, anggota DPRD Kabupaten OKU Timur diharapkan dapat terus meningkatkan komunikasi yang terbuka dan dua arah dalam kegiatan reses dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan mereka. Pelaksanaan reses juga perlu dilakukan dengan pengelolaan waktu yang baik agar berbagai aspirasi yang disampaikan dapat didengarkan dan dicatat secara lebih terarah. Selain itu, anggota DPRD diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada masyarakat mengenai proses tindak

lanjut aspirasi, termasuk menjelaskan apabila suatu aspirasi memerlukan koordinasi dengan pihak lain atau belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kewenangan, perencanaan, maupun anggaran.

Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan permasalahan di lingkungan mereka secara jelas dan konstruktif. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian mengenai komunikasi dalam kegiatan reses dapat dikembangkan dengan melibatkan perspektif masyarakat sebagai penerima sekaligus pemberi aspirasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, D., Sadono, T. P., & Pramono, B. S. (2026). Political communication strategies of DPRD members in absorbing public aspirations: A case study of Jombang Regency period 2024–2029. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 5(1).
- Cangara, H. (2017). Perencanaan dan strategi komunikasi. Rajawali Pers.
- Maharani, A. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.20961/respublica.v1i1.46724>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Utomo, E. P., & Cangara, H. (2013). Strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(4). <https://doi.org/10.31947/kjik.v2i4.340>
- Zebua, A., Hasibuan, S., Napitupulu, E. E., & Sembiring, L. G. A. B. (2026). Political communication strategies of Medan City DPRD members during recess in their electoral district in Labuhan, Medan. *Journal Analytica Islamica*, 15(2).